

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan eksekusi putusan pada tingkat kasasi terhadap terdakwa yang ditangguhkan penahanannya; 2) untuk mengetahui dan menganalisis konstruksi hukum yang ideal mengenai pengaturan eksekusi putusan pada tingkat kasasi terhadap terdakwa yang ditangguhkan penahanannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginterpretasikan, mengevaluasi dan menilai semua peraturan perundang-undangan serta menilai bahan-bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) bahwa terjadi kekaburan norma terhadap pengaturan eksekusi putusan pada tingkat kasasi terhadap terdakwa yang ditangguhkan penahanannya, baik di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu seperti dimaksud dalam Pasal 270 jo Pasal 1 angka 6 huruf a secara jelas dinyatakan, bahwa yang melaksanakan keputusan pengadilan adalah jaksa. Akan tetapi ketentuan tentang pelaksanaan keputusan pengadilan atau KUHAP sendiri tidak menyebut, bagaimana caranya jaksa melaksanakan keputusan tersebut. maka hendaknya diadakan perubahan-perubahan ataupun penambahan-penambahan, dengan suatu ketentuan yang tegas diatur dalam pasal-pasal pelaksanaan eksekusi khususnya dalam melaksanakan putusan pengadilan terhadap terpidana yang sebelumnya tidak dilakukan penahanan karena penahanannya ditangguhkan tersebut; 2) konstruksi hukum yang ideal mengenai pengaturan eksekusi putusan pada tingkat kasasi terhadap terdakwa yang ditangguhkan penahanannya bahwa perlu dilakukan pembaruan hukum terkait tentang pihak yang bertanggung jawab atas larinya terpidana karena alasan adanya penangguhan penahanan di tingkat kasasi. Begitu pula dengan sanksi yang harus diterima oleh hakim kasasi terhadap terpidana yang melarikan diri karena alasan adanya penangguhan penahanan tersebut.

Kata Kunci: Pengaturan, Eksekusi Putusan, Terdakwa Yang Ditangguhkan Penahanannya.

**DECISION EXECUTION ARRANGEMENTS AT THE LEVEL OF CASSATION
AGAINST A DEFENDANT WHOSE DEFENDANT HAS BEEN SUSPENDED IN
CRIMINAL PROCEDURE LEGAL PERSPECTIVE**

ABSTRACT

This study aims 1) to identify and analyze the execution arrangements for decisions at the cassation level against defendants whose detention has been suspended; 2) to know and analyze. ideal legal construction regarding the regulation of the execution of a decision at the cassation level against a defendant whose detention has been suspended. The research method used is normative legal research method and the approach used is statutory approach and conceptual approach and case approach. Analysis of the legal materials used in this study was carried out by interpreting, evaluating and assessing all laws and regulations as well as assessing relevant legal materials. The results of the study show that 1) the arrangement for the execution of the decision at the cassation level against the defendant whose detention was suspended, that there has been legal ambiguity regarding the arrangement for the execution of the decision at the cassation level against the defendant whose detention was suspended, both in the Criminal Procedure Code and in other laws and regulations. Arrangements regarding the execution of the judge's decision against the defendant whose detention has been suspended are not regulated clearly and unequivocally. Firm and clear arrangements relating to the method of releasing detainees due to suspension of detention are regulated in Article 25 of the Regulation of the Minister of Justice Number M.04.UM.01.06/1983; 2) the ideal legal construction regarding the regulation of the execution of a decision at the cassation level against a defendant whose detention has been suspended means that it is necessary to reform the relevant law regarding the party responsible for the escape of the convict due to the reason for the suspension of detention at the cassation level. Like wise with the sanctions that must be received by the cassation judge against convicts who run away because of the reason for the suspension of detention.

Keywords: Arrangements, Execution of Decisions, Suspended Defendants.